

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Akuntansi keuangan pemerintah daerah di Indonesia merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi tahun 1998. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan baru dari pemerintah Republik Indonesia yang mereformasi berbagai hal termasuk pengelolaan keuangan daerah. Reformasi tersebut awalnya dilakukan dengan mengganti Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dan UU Nomor 25 Tahun 1999 yang menggantikan UU Nomor 32 Tahun 1956 mengenai keuangan negara dan daerah.

UU Nomor 22 Tahun 1999 tersebut berisi mengenai perlunya dilaksanakan otonomi daerah, sehingga UU tersebut sering disebut dengan UU Otonomi Daerah. Otonomi daerah adalah wewenang yang dimiliki daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah tersebut, maka perubahan yang cukup mendasar dalam pengelolaan daerah, termasuk dalam manajemen atau pengelolaan keuangan daerah, dapat diduga terjadi. Hal ini disebabkan karena manajemen keuangan daerah merupakan alat untuk mengurus dan mengatur rumah tangga pemerintah daerah.

Salah satu aspek penting dalam reformasi birokrasi adalah penataan manajemen pemerintah pusat dan daerah (provinsi, kabupaten dan kota). Hal

tersebut dinilai penting antara lain karena keberhasilan suatu kebijakan ditentukan pula oleh kemampuan manajemen dalam birokrasi pemerintahan untuk melaksanakan kebijakan tersebut secara efisien dan efektif. Seluruh aktivitas dalam lingkungan instansi pemerintah akan diukur dari sisi akuntabilitas kinerjanya, baik dari sisi kinerja individu, kinerja unit kerja dan kinerja instansi, dan bahkan juga kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Kinerja merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Salah satu visi dan tujuan organisasi pemerintah adalah Pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebagai tolak ukur kinerja, tolak ukur kinerja merupakan komponen lainnya yang harus dikembangkan untuk dasar pengukuran kualitas laporan keuangan.

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga daerahnya sehingga tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat. Organisasi sektor publik adalah organisasi yang terbentuk untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Dana yang digunakan dalam organisasi ini adalah berasal dari dana publik, untuk itu pemerintah tidak hanya berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat saja tetapi juga kepada masyarakat luas, karena itu diperlukan teknologi informasi pengukuran kinerja untuk menilai suatu strategi. Dalam pengukuran kinerja ini, pemanfaatan yang dipakai adalah teknologi informasi. Teknologi informasi mempunyai manfaat untuk membuat

mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah, serta mengevaluasi kinerja. Pemanfaatan Teknologi Informasi sangat berpengaruh bagi kualitas laporan keuangan dalam suatu dinas/perusahaan.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Kupang merupakan salah satu penyelenggara pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah di kabupaten kupang. Perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan dapat mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Atas dasar itu perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional sehingga dalam perumusannya dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk menjamin kualitas perencanaan pembangunan daerah maka dalam pelaksanaannya menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis.

Sebagai salah satu penyelenggara pemerintah kabupaten kupang, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas laporan keuangannya. Untuk mencapai hal tersebut, perlu adanya suatu teknologi informasi dan kompetensi SDM dan sistem pengendalian yang digunakan untuk mengelolah dana secara desentralisasi dengan transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat

luas. Oleh karena itu, suatu teknologi informasi yang baik, menjadi tolak ukur seberapa baik kualitas laporan keuangan yang ada pada sebuah entitas penyelenggara pemerintah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Perkembangan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah belum sesuai sebagaimana yang diharapkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari BPK RI masih terdapat laporan keuangan yang mendapatkan opini *disclaimer* atau tidak memberikan pendapat. Berikut Perkembangan opini laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2016-2020:

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Opini LKPD 2016-2020**

LKPD	OPINI								
	Tahun	WTP	%	WDP	%	TMP	%	TW	%
	2016	368	69%	141	27%	23	4%	0	0%
	2017	411	76%	113	21%	18	3%	0	0%
	2018	443	82%	86	16%	13	2%	0	0%
	2019	484	89%	51	9%	7	1%	0	0%
	2020	487	90%	49	9%	3	1%	2	0%

*Sumber: IHPS BPK RI Semester I Tahun 2021*

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa berkembang opini laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 secara menyeluruh dalam 5 tahun terakhir mengalami perbaikan. Selama periode tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) naik 69% pada tahun 2016 menjadi 90% pada tahun 2020. Kenaikan opini dari tahun 2018 terjadi pada seluruh pemerintah daerah. Kenaikan opini dari TMP/WDP menjadi WTP dan TMP menjadi WDP dikarenakan pemerintah daerah telah menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK tahun 2019 dengan melakukan perbaikan atas kelemahan sistem pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga akun-akun dalam laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan sesuai dengan SAP (BPK RI, 2021).

Opini atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kupang hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 secara keseluruhan mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) sehingga Kabupaten Kupang termasuk dapat mempertahankan atau

meningkatkan opini tersebut. Berikut Daftar Tabel opini hasil pemeriksaan LKPD Oleh BPK Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur selama tahun 2016-2020.

**Tabel 1.2**  
**Perkembangan Opini LKPD Kabupaten Kupang 2016-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Opini</b>
2016	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2017	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2018	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2019	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2020	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

*Sumber : ntt.bpk.go.id*

Berdasarkan Tabel. 1.2 di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Kupang mendapatkan Opini BKP berupa WDP (Wajar Dengan Pengecualian), hal ini menunjukkan adanya beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian Pimpinan DPRD, Kepala Daerah, dan Inspektur Kabupaten/Kota, yaitu, hasil Pemeriksaan atas Manajemen Aset Tahun Anggaran 2019 dan Semester I 2020 pada Pemerintah Kabupaten Kupang, masih menunjukkan kelemahan antara lain, (1) Pengelolaan, penatausahaan dan penyajian Aset Tetap yaitu kegiatan inventarisasi aset tetap belum memadai dan belum didukung dokumentasi yang cukup, 2) Aset Tetap dicatat ganda dan diantaranya dicatat dengan nilai perolehan yang berbeda, dan (3) Pencatatan pinjam pakai barang milik pemerintah daerah belum sesuai ketentuan dan pengamanan aset dan barang milik daerah pada pemerintah daerah yang belum optimal.

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andrianto (2017), hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan yang diukur dengan keterandalan laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh kapasitas

sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern. Hal ini diharapkan bisa dijadikan acuan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah dengan memperhatikan kapasitas sumber daya manusia yang ada, pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dan pengendalian intern akuntansi yang memadai.

Penelitian kedua Kalumata dan Warogan (2016), hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, teknologi informasi, reviu laporan keuangan dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sudah baik dan kompetensi sumber daya manusia, teknologi informasi, reviu laporan keuangan yang tersedia, dan menjalankan sistem pengendalian internal dengan baik sehingga pembuatan laporan keuangan tersebut berkualitas.

Penelitian ketiga oleh Putriasri (2017), hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia tinggi, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan baik, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dapat dipahami dan implementasikan dengan baik, maka kualitas laporan keuangan Pemerintah daerah yang dihasilkan akan semakin baik.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan Judul “ **Pengaruh Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Kupang**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka masalah yang dapat diambil adalah :

1. Apakah Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan?
2. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan?
3. Apakah Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan?
4. Apakah Teknologi Informasi, Kompetensi SDM dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan diatas, maka Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui pengaruh teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan.
4. Untuk mengetahui pengaruh teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan.



#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kupang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kupang untuk mengevaluasi penerapan Teknologi Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kupang sehingga dapat memperbaiki Kualitas Laporan Keuangan.

2. Bagi Universitas

Dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Terutama untuk memberikan masukan dan tambahan informasi serta menyampaikan saran yang mungkin bermanfaat bagi Fakultas Ekomonika dan Bisnis, mengenai masalah yang di hadapi yaitu tentang Teknologi Informasi dan Kualitas Laporan Keuangan.

3. Bagi penelitian lain

Sebagai Bahan Informasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut.